



RENCANA KERJA (RENJA) 2024



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDANGAN
PROVINSI JAMBI**

DAFTAR ISI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2024

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	1
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	39
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	40
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	52
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	56
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	58
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	58
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	59
	3.3 Program dan Kegiatan	63
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	81
BAB V	PENUTUP	101



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI JAMBI TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 16);

27. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 10);
31. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Jambi.
5. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

Renja PD meliputi :

- a. penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) PD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi selama 1 (satu) tahun;
- b. kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat; dan
- c. gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun direncanakan.

BAB III
SISTEMATIKA
Pasal 3

- (1) Sistematika Renja PD Provinsi Jambi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Hasil Evaluasi Renja PD Tahun lalu;
 - c. BAB III Tujuan dan Sasaran PD;
 - d. BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan PD;
 - e. BAB V Penutup;
- (2) Sistematika Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

- (1) Renja PD Tahun 2024 merupakan :
- a. Penjabaran arah pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026; dan
 - b. Hasil pejarangan aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) yang didalamnya terdapat prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun :
- a. Rencana Kerja Anggaran PD Tahun 2024;
 - b. Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024; dan
 - c. RAPBD Tahun 2024.

Pasal 5

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2024 :

- a. PD menggunakan Renja PD Tahun 2024 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi; dan
- b. PD menggunakan Renja PD Tahun 2024 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja Anggaran PD dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.

Pasal 6

Dalam hal RAPBD Tahun 2024 yang ditetapkan berbeda dari hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, PD menggunakan RAPBD Tahun 2024 hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jambi.

BAB V
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 11 Oktober 2023
GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. AL HARIS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 11 Oktober 2023

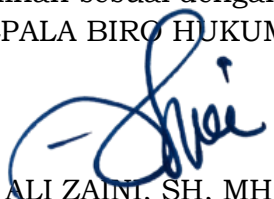
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttd

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2023 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
Z. KEPALA BIRO HUKUM,



M. ALI ZAINI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19730729 200012 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 angka 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pada pasal 13 ayat (2) dalam Permendagri yang sama disebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Proses penyusunan Renja dimulai dari tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan renja, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan Renja ini berpedoman pada RKPD, Rensta Perangkat Daerah dan Renja Kementerian/Lembaga terkait yang kemudian diharapkan menjadi pedoman dalam proses penyusunan RKA, KUA PPAS dan RAPBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Identifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9000.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Identifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

- Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jambi Tahun 2020-2040
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 10);
 19. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi;
 20. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 40 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi;
 21. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026;
 22. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
 23. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi adalah untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

b. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2024 adalah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA, KUA PPAS dan RAPBD Disperidag Provinsi Jambi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Secara umum pada tahun 2022, terdapat 4 indikator kinerja yang tidak memenuhi target. Sementara 2 indikator kinerja memenuhi target dan 6 indikator kinerja lainnya melebihi target. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Evaluasi
			Target	Realisasi	%	
1	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB	7,97	9,77	122,58	Melebihi Target
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas	0,41	3,05	743,90	Melebihi Target
		Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan	257.866	75.801	29,40	Tidak Memenuhi Target
2	Tumbuh dan Berkembangnya Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	93,00	100,00	107,53	Melebihi Target
		Persentase Barang Beredar yang Diawasi yang Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	41,80	40,00	95,69	Tidak Memenuhi Target
		Persentase Komoditi Potensial yang Sesuai dengan Ketentuan Berlaku	62,00	98,28	158,52	Melebihi Target

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Evaluasi
			Target	Realisasi	%	
		Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	91,00	91,00	100,00	Memenuhi Target
		Tertib Usaha	60,00	60,00	100,00	Memenuhi Target
3	Meningkatkannya Nilai Ekspor	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	0,983	0,968	98,47	Tidak Memenuhi Target
		Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	6,00	31,79	484,60	Melebihi Target
4	Meningkatnya kualitas Kinerja Pelayanan eksternal dan internal organisasi	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Disperindag	77,00	79,97	103,86	Melebihi Target
5	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	BB	CC	84,36	Tidak Memenuhi Target

Dari data diatas dapat dijabarkan bahwa:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah:
 - a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri melalui Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi, Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Koordinasi tidak memenuhi target kinerja Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri dan Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas.

Hal ini disebabkan oleh Pandemi COVID-19 yang merupakan faktor utama menurunnya lapangan usaha sebagai penyerap tenaga kerja. Disamping itu, faktor lain seperti kesesuaian/kualitas SDM, sulitnya memperoleh bahan

baku dan sistem pengelolaan keuangan yang kurang baik menyebabkan beberapa industri yang berhenti produksi.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah merencanakan/menganggarkan untuk:

- 1) Pelatihan-pelatihan yang diperlukan dalam menyesuaikan/meningkatkan kualitas SDM; dan
 - 2) Bantuan berupa alat untuk membantu dan melancarkan usaha IKM sesuai dengan kebutuhan.
- b. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen melalui Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota tidak memenuhi target Kinerja Persentase Barang Beredar yang Diawasi yang Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Hal ini disebabkan oleh pemahaman atas formula perhitungan IKU dan keterbatasan anggaran dalam melaksanakan pengawasan.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah merencanakan/menganggarkan untuk:

- 1) Kegiatan sosialisasi untuk memahami formula perhitungan IKU; dan
 - 2) Mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang ada.
- c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi melalui Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah serta Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tidak memenuhi target Kinerja Nilai SAKIP.

Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap komponen dan bobot penilaian. Selain itu, dokumen yang kurang lengkap juga menjadi kendala dalam proses penilaian.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah merencanakan/menganggarkan untuk:

- 1) Mengikuti diklat/bimbingan teknis/sosialisasi terkait SAKIP; dan

- 2) Melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penilaian SAKIP.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah:
 - a. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting melalui Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan serta Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya telah memenuhi target Kinerja Persentase Kinerja Realisasi Pupuk.

Hal ini disebabkan oleh tercapainya target Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah merencanakan/menganggarkan untuk meningkatkan kerja sama dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi.
 - b. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan melalui Kegiatan Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar telah memenuhi target Kinerja Tertib Usaha.

Hal ini disebabkan oleh kepedulian dan komitmen untuk menyelesaikan rekomendasi yang sesuai dengan peruntukannya.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah merencanakan/menganggarkan untuk mempertahankan/meningkatkan kepedulian dan komitmen dalam menyelesaikan rekomendasi yang sesuai dengan peruntukannya.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah:
 - a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri melalui Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Koordinasi; Subkegiatan Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri. Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat serta Subkegiatan Evaluasi terhadap

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri melebihi target Kinerja Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB dan Kinerja Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas.

Untuk Kinerja Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB disebabkan oleh Industri Makanan dan Minuman yang mencapai 12,55 triliun rupiah atau sebesar 46,49 persen. Berikutnya Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari bambu, Rotan dan Sejenisnya sebesar 10,50 persen; Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman sebesar 6,08 persen; dan Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik 5,32 persen.

Sedangkan untuk Kinerja Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas disebabkan oleh pertumbuhan positif Pengolahan Tembakau (36,00 persen); Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Rekaman (19,67 persen); Industri Furnitur (16,02); Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya (7,44 persen); Industri Mesin dan Perlengkapan (6,50 persen); Industri Makanan dan Minuman (3,66 persen); Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki (3,58 persen); Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan (3,49 persen); Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional (2,96 persen); serta Industri Tekstil dan Pakaian Jadi (2,30 persen).

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah merencanakan/menganggarkan untuk mempertahankan/meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak untuk pencapaian target kinerja.

- b. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen melalui Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota melebihi target kinerja Kinerja Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen, Kinerja Persentase Komoditi Potensial yang Sesuai dengan Ketentuan Berlaku dan Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Disperindag.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

Hal ini disebabkan oleh:

- 1) Komitmen untuk hadir dan melindungi hak-hak konsumen menjadi penting dalam usaha penyelesaian pengaduan konsumen;
- 2) Keberadaan UPTD BPSMB, memudahkan proses-proses pengujian sampel sehingga dapat dilihat apakah komoditi yang diuji sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak; dan
- 3) Pemahaman akan pelayanan dan kesadaran dalam melayani merupakan unsur pendukung dalam capaian indeks IKM.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah merencanakan/menganggarkan untuk mempertahankan/meningkatkan:

- 1) Komitmen untuk hadir dan melindungi hak-hak konsumen;
 - 2) Mengoptimalkan keberadaan UPTD BPSDM dalam menguji komoditi potensial; dan
 - 3) Pemahaman akan pelayanan dan kesadaran dalam melayani para pemangku kepentingan.
- c. Program Pengembangan Ekspor melalui Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi melebihi target Kinerja Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan nilai ekspor batu bara, karet dan olahannya serta minyak nabati.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah merencanakan/menganggarkan untuk mempertahankan/meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak untuk pencapaian target kinerja.

2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dengan memperhitungkan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Target Kinerja Tahun 2023, baru 3 dari 12 indikator kinerja yang telah melebihi target renstra. Selebihnya belum memenuhi target. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Evaluasi
1	Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB	7,97	8,3	96,02%	Belum Memenuhi Target
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas	3,46	1,27	272,44%	Melebihi Target
		Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan	257.866	278.533	92,58%	Belum Memenuhi Target
2	Tumbuh dan Berkembangnya Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	100	97	103,09%	Melebihi Target
		Persentase Barang Beredar yang Diawasi yang Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	41,8	51,1	81,80%	Belum Memenuhi Target
		Persentase Komoditi Potensial yang Sesuai dengan Ketentuan Berlaku	62	70	88,57%	Belum Memenuhi Target
		Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	91	94	96,81%	Belum Memenuhi Target
		Tertib Usaha	60	62	96,77%	Belum Memenuhi Target

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Evaluasi
3	Meningkatkannya Nilai Ekspor	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	0,983	1,034	95,07%	Belum Memenuhi Target
		Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	37,79	30	125,97%	Melebihi Target
4	Meningkatnya kualitas Kinerja Pelayanan eksternal dan internal organisasi	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Disperindag	78	81	96,30%	Belum Memenuhi Target
5	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	B	BB	97,13%	Belum Memenuhi Target

Dari data diatas dapat dijabarkan bahwa:

1. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah:
 - a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri melalui Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Koordinasi; Subkegiatan Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri. Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat serta Subkegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri melebihi target Kinerja Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

Hal ini disebabkan oleh besarnya capaian kinerja pada tahun 2022 yakni sebesar 3,05% dan perkiraan pertumbuhan pada tahun 2023 sebesar 0,41%. Sehingga realisasi sampai dengan tahun 2023 diperkirakan berada pada angka 3,46%, sementara target renstra sampai dengan tahun 2026 hanya berada pada angka 1,27%.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah merencanakan/menganggarkan untuk mempertahankan/meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak untuk pencapaian target kinerja.

- b. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen melalui Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota melebihi target kinerja Kinerja Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen.

Hal ini disebabkan oleh capaian kinerja pada tahun 2022 yakni sebesar 100% dan perkiraan capaian pada tahun 2023 juga sebesar 100%. Sehingga realisasi sampai dengan tahun 2023 diperkirakan tetap berada pada angka 100%, sementara target renstra sampai dengan tahun 2026 berada pada angka 97%. Namun capaian ini tidak bersifat mutlak karena bisa saja capaian kinerja ini berfluktuatif hingga tahun 2026 nanti.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah merencanakan/menganggarkan untuk terus mempertahankan/meningkatkan komitmen untuk hadir dan melindungi hak-hak konsumen.

- c. Program Pengembangan Ekspor melalui Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi melebihi target Kinerja Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas. Hal ini disebabkan oleh besarnya capaian kinerja pada tahun 2022 yakni sebesar 31,79% dan perkiraan pertumbuhan pada tahun 2023 sebesar 6%. Sehingga realisasi sampai dengan tahun 2023 diperkirakan berada pada angka 37,79%, sementara target renstra sampai dengan tahun 2026 berada pada angka 30%.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah merencanakan/menganggarkan untuk terus mempertahankan/

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak untuk pencapaian target kinerja.

2. Realisasi program/kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah:

Beberapa program dan kegiatan lainnya belum memenuhi 9 target kinerja yang direncanakan. Hal ini dapat dimaklumi karena pelaksanaan renstra baru memasuki tahun kedua dan masih ada waktu selama 3 tahun lagi untuk dapat memenuhi target kinerja tersebut.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah merencanakan/menganggarkan program dan kegiatan yang mendukung pemenuhan target-target kinerja yang direncanakan sesuai renstra.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 secara lengkap dapat dilihat pada tabel pada halaman-halaman berikutnya.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			K	Satuan	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		6	7	8=(7/6)	9	10=(7+10)	11=(10/4)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase penyelesaian rekomendasi perizinan, pendaftaran dan perizinan yang sesuai peruntukannya	100,00	%	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00
		Persentase Tertib Usaha	62,00	%	60,00	60,00	100,00%	60,00	60,00	96,77
3.30.02.1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Jumlah pengendalian usaha perdagangan	75,00	Pelaku Usaha	4,00	3,00	75,00%	13,00	16,00	21,33
3.30.02.1.03.02	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	35,00	Dokumen	4,00	3,00	75,00%	6,00	9,00	25,71

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			K	Satuan	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		6	7	8=(7/6)	9	10=(7+10)	11=(10/4)
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase kinerja realisasi pupuk	94,00	%	90,00	91,00	101,11%	91,00	91,00	96,81
		Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	5,90	%	5,90	5,90	100,00%	5,90	5,90	100,00
3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Periode pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	72,00	Bulan			#DIV/0!	12,00	12,00	
3.30.04.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	11,00	Laporan			#DIV/0!	11,00	11,00	
3.30.04.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	36,00	Laporan			#DIV/0!	6,00	6,00	

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			K	Satuan	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		6	7	8=(7/6)	9	10=(7+10)	11=(10/4)
3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Periode pengendalian harga dan informasi ketersediaan stok Bapok dan Bapokting	72,00	Bulan	12,00	12,00	100,00%	12,00	24,00	33,33
3.30.04.1.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	2,00	Laporan	4,00	4,00	100,00%	-	4,00	200,00
3.30.04.1.02.02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	56,00	Laporan	11,00	11,00	100,00%	11,00	22,00	39,29

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			K	Satuan	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		6	7	8=(7/6)	9	10=(7+10)	11=(10/4)
3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Kabupaten Kota yang dilakukan pengawasan Pupuk Bersubsidi	11,00	Kab/Kota	11,00	11,00	100,00%	11,00	11,00	100,00
3.30.04.1.03.01	Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi	Jumlah Laporan Pemeriksaan Kegiatan Distribusi	50,00	Laporan	6,00	6,00	100,00%	8,00	14,00	28,00
3.30.04.1.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	66,00	Laporan	11,00	11,00	100,00%	11,00	22,00	33,33
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	30,00	%	6,00	31,79	529,83%	6,00	37,79	125,97
3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Produk Ekspor Unggulan Provinsi Jambi	34,00	Produk	6,00	-	0,00%	6,00	6,00	17,65
3.30.05.1.01.05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	500,00	Pelaku Usaha	100,00	100,00	100,00%	100,00	200,00	40,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			K	Satuan	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		6	7	8=(7/6)	9	10=(7+10)	11=(10/4)
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	100,00	%	93,00	100,00	107,53%	100,00	100,00	100,00
		Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	51,10	%	41,00	5,70	13,90%	41,80	41,80	81,80
		Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	70,00	%	60,00	98,28	163,80%	62,00	62,00	88,57
		Nilai IKM Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	81,00	(indeks B)	77,00	79,97	103,86%	78,00	78,00	96,30
3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Konsumen	11,00	Kab/Kota	11,00	11,00	100,00%	11,00	11,00	100,00
3.30.06.1.01.01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	2,00	BPSK	3,00	3,00	100,00%	3,00	6,00	300,00
3.30.06.1.01.02	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	10,00	LPKSM			#DIV/0!	2,00	2,00	
3.30.06.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	260,00	Pengaduan	40,00	40,00	100,00%	40,00	80,00	30,77

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			K	Satuan	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		6	7	8=(7/6)	9	10=(7+10)	11=(10/4)
3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian mutu produk	15.654,00	Parameter	2.395,00	2.509,00	104,76%	2.515,00	5.024,00	32,09
		Jumlah PAD jasa Pelayanan Laboratorium	1.537.507.337,00		278.250.000,00	217.160.000,00	78,04%	298.000.000,00	515.160.000,00	33,51
		Periode Penerapan Dokumen Sistem Mutu Laboratorium Terakreditasi sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017	72,00	Bulan	12,00	12,00	100,00%	12,00	24,00	33,33
		Periode Layanan Pengujian dan Kalibrasi di UPTD BPSMB	72,00	Bulan	12,00	12,00	100,00%	12,00	24,00	33,33
3.30.06.1.02.01	Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	352,00	Komoditi	44,00	44,00	100,00%	55,00	99,00	28,13
3.30.06.1.02.02	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	15.654,00	Dokumen	2.509,00	2.509,00	100,00%	2.515,00	5.024,00	32,09
3.30.06.1.02.03	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	16,00	Sertifikat	4,00	4,00	100,00%	2,00	6,00	37,50
3.30.06.1.02.04	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	99,00	Sertifikat	15,00	15,00	100,00%	487,00	502,00	507,07
3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten Kota yang dilakukan pengawasan barang beredar/atau jasa	11,00	Kab/Kota	11,00	11,00	100,00%	11,00	11,00	100,00
3.30.06.1.03.01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	54,00	Laporan	9,00	9,00	100,00%	9,00	18,00	33,33

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			K	Satuan	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		6	7	8=(7/6)	9	10=(7+10)	11=(10/4)
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pasar Modern yang memasarkan produk dalam negeri	65,00	%	45,00	100,00	222,22%	50,00	50,00	76,92
3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah Promosi penggunaan Produk dalam Negeri	20,00	Kali	5,00	-	0,00%	5,00	5,00	25,00
3.30.07.1.01.01	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kepersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	36,00	UMKM	9,00	9,00	100,00%	6,00	15,00	41,67
3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Mou Kemitraan UKM	60,00	Dokumen			#DIV/0!	5,00	5,00	8,33
3.30.07.1.02.01	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	59,00	UMKM			#DIV/0!	5,00	5,00	8,47

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			K	Satuan	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		6	7	8=(7/6)	9	10=(7+10)	11=(10/4)
3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Informasi Perdagangan	11,00	Kab/Kota			#DIV/0!	11,00	11,00	100,00
3.30.07.1.03.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	10,00	Dokumen			#DIV/0!	2,00	2,00	20,00
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertambahan jumlah industri besar di Provinsi	1,00	persen	1,00	1,00	100,00%	1,00	2,00	200,00
		Persentase Pertumbuha n PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	0,48	persen	0,39	3,05	782,05%	0,41	3,46	720,83
		Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	8,30	persen	7,86	9,77	124,30%	7,97	7,97	96,02
		nilai ekspor non migas	1,034	US\$ Milyar	0,966	0,97	100,21%	0,98	0,98	95,07
		Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (PMA dan PMDN)	0,93	Triliun	0,53	2,10	398,48%	0,63	0,63	67,96

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			K	Satuan	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		6	7	8=(7/6)	9	10=(7+10)	11=(10/4)
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	84,00	persen	80,00	107,26	134,08%	81,00	81,00	96,43
		Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan (orang)	278.533	orang	250.977,00	75.801,00	30,20%	257.866,00	257.866,00	92,58
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	84,00	%	80,00	107,26	134,08%	81,00	188,26	224,12
		Persentase pertambahan jumlah industri besar di Provinsi	5,00	%	1,00	1,00	100,00%	1,00	2,00	40,00
3.31.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	50,00	Dokumen	2,00	2,00	100,00%		2,00	4,00
3.31.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	110,00	Dokumen	20,00	20,00	100,00%	3,00	23,00	20,91

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			K	Satuan	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		6	7	8=(7/6)	9	10=(7+10)	11=(10/4)
3.31.02.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	28,00	Dokumen			#DIV/0!	6,00	6,00	21,43
3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	75,00	Dokumen	15,00	15,00	100,00%	5,00	20,00	26,67
3.31.02.1.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	66,00	Dokumen	11,00	11,00	100,00%	11,00	22,00	33,33
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin sesuai kewenangan yang dikendalikan	20,00	%	20,00	20,00	100,00%	20,00	20,00	100,00
3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100,00	%	20,00	20,00	100,00%	100,00	120,00	120,00
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100,00		-	-	#DIV/0!	100,00	100,00	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			K	Satuan	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		6	7	8=(7/6)	9	10=(7+10)	11=(10/4)
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100,00		-	-	#DIV/0!	100,00	100,00	100,00
3.31.03.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	160,00	Perusahaan	20,00	16,00	80,00%	30,00	46,00	28,75

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			K	Satuan	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		6	7	8=(7/6)	9	10=(7+10)	11=(10/4)
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	25,00	%	5,00	5,00	100,00%	10,00	10,00	40,00
3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Data dan Informasi Industri Berbasis SIINas	6.690,00	Unit	1.115,00	-	0,00%	1.115,00	1.115,00	16,67
		Periode penyampaian informasi Industri Kewenangan Provinsi	72,00	Bulan	12,00	12,00		12,00	24,00	33,33
3.31.04.1.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	6,00	Dokumen	1,00	1,00	100,00%	1,00	2,00	33,33
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Predikat AKIP	BB		BB	CC	0,74%	B	97,13	97,13
		Predikat AKIP Perangkat Daerah	Predikat AKIP		-	-		Predikat AKIP		
3.31.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	42,00	Dokumen	6,00	6,00	100,00%	7,00	13,00	30,95
3.31.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	36,00	Dokumen	6,00	6,00	100,00%	6,00	12,00	33,33

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			K	Satuan	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		6	7	8=(7/6)	9	10=(7+10)	11=(10/4)
3.31.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen			#DIV/0!	6,00	6,00	#DIV/0!
3.31.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6,00	Laporan	1,00	1,00	100,00%	1,00	2,00	33,33
3.31.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Periode penyediaan Administrasi Keuangan	72,00	Bulan	12,00	12,00	100,00%	12,00	24,00	33,33
3.31.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84,00	Orang/ Bulan	14,00	14,00	100,00%	14,00	28,00	33,33
3.31.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72,00	Dokumen	12,00	12,00	100,00%	12,00	24,00	33,33
3.31.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	30,00	Dokumen	5,00	5,00	100,00%	4,00	9,00	30,00
3.31.01.1.03	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	18,00	Dokumen	3,00	3,00	100,00%	-	3,00	16,67
3.31.01.1.03.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas dan Perindustrian dan Perdagangan)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18,00	Unit	3,00	3,00	100,00%	-	3,00	16,67

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			K	Satuan	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		6	7	8=(7/6)	9	10=(7+10)	11=(10/4)
3.31.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jambi	1.013,00	Orang	165,00	104,00	63,03%	175,00	279,00	27,54
3.31.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5,00	Paket			#DIV/0!	1,00	1,00	20,00
3.31.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	30,00	Dokumen	5,00	5,00	100,00%	5,00	10,00	33,33
3.31.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	180,00	Orang/Kali	30,00	15,00	50,00%	30,00	45,00	25,00
3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Periode penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	72,00	Bulan	12,00	12,00	100,00%	12,00	24,00	33,33
3.31.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	115,00	Paket	20,00	12,00	60,00%	1,00	13,00	11,30
3.31.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	72,00	Paket	12,00	12,00	100,00%	12,00	24,00	33,33
3.31.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30,00	Paket	5,00	5,00	100,00%	5,00	10,00	33,33
3.31.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	360,00	Dokumen	60,00	60,00	100,00%	60,00	120,00	33,33

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			K	Satuan	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		6	7	8=(7/6)	9	10=(7+10)	11=(10/4)
3.31.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.008,00	Laporan	168,00	128,00	76,19%	12,00	140,00	13,89
3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	72,00	Bulan	12,00	12,00	100,00%	12,00	24,00	33,33
3.31.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.000,00	Laporan	3.500,00	3.000,00	85,71%	12,00	3.012,00	14,34
3.31.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72,00	Laporan	12,00	12,00	100,00%	12,00	24,00	33,33
3.31.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72,00	Laporan	12,00	12,00	100,00%	12,00	24,00	33,33
3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Periode Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	72,00	Bulan	12,00	12,00	100,00%	12,00	24,00	33,33
3.31.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	125,00	Unit	25,00	25,00	100,00%	30,00	55,00	44,00
3.31.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	185,00	Unit	20,00	20,00	100,00%	20,00	40,00	21,62

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdapat beberapa Indikator Kinerja Kunci Urusan Pedagangan Provinsi dan Urusan Perindustrian Provinsi yang dijalankan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi. Beberapa indikator tersebut, disajikan pada table berikut ini.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

NO	Indikator Kinerja Kunci	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Urusan Perdagangan										
1	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	6,00	6,00	6,00	6,00	31,79	6,00	6,00	6,00	Sesuai Rencana
2	Persentase penanganan pengaduan konsumen	93,00	93,00	95,00	97,00	100,00	93,00	95,00	97,00	Sesuai Rencana
3	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	62,00	62,00	66,00	67,00	98,28	62,00	66,00	67,00	Sesuai Rencana
4	Tertib Usaha	60,00	60,00	60,00	62,00	60,00	60,00	60,00	62,00	Sesuai Rencana
5	Persentase kinerja realisasi pupuk	91,00	91,00	92,00	92,00	91,00	91,00	92,00	92,00	Sesuai Rencana
6	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	41,80	41,80	43,25	46,60	40,00	41,80	43,25	46,60	Sesuai Rencana
7	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	5,90	5,90	5,90	5,90	2,81	5,90	5,90	5,90	Sesuai Rencana
Urusan Perindustrian										
1	Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Sesuai Rencana
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	80,00	81,00	82,00	83,00	64,30	81,00	82,00	83,00	Sesuai Rencana
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	Sesuai Rencana
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100,00	100,00	100,00	100,00	N/A	100,00	100,00	100,00	Pada Tahun 2022 Tidak Ada IPIU

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja Kunci	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100,00	100,00	100,00	100,00	N/A	100,00	100,00	100,00	Pada Tahun 2022 Tidak Ada IPKI
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	5,00	10,00	15,00	20,00	5,00	10,00	15,00	20,00	Sesuai Rencana

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Tahun 2022, tidak terdapat IPU dan IPKI. Selain itu, hanya kinerja Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan dan Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP yang belum mencapai target. Untuk Tahun 2024 dan tahun-tahun lainnya, kinerja diharapkan sesuai dengan rencana.

2.3.2 Koordinasi dan Sinergi Program antara Perangkat Daerah Provinsi dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota serta Dengan Kementerian dan Lembaga di Tingkat Pusat Dalam Rangka Pencapaian Kinerja Pembangunan

Untuk Koordinasi dan Sinergi Program antara Perangkat Daerah Provinsi dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota serta Dengan Kementerian dan Lembaga di Tingkat Pusat Dalam Rangka Pencapaian Kinerja Pembangunan telah dilakukan melalui Rapat Koordinasi Teknis Rencana Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun Anggaran 2024. Rakortekrenbang dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota telah dilaksanakan pada tanggal 10-13 April 2023. Sedangkan, Rakortekrenbang dengan Pemerintah Pusat telah dilaksanakan pada Hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 dengan hasil sebagaimana terdapat dalam table berikut.

**Hasil Pembahasan Desk Urusan Pemerintahan
Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2024
antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi**

No	Indikator Kinerja Urusan	Target Renstra	Hasil Rakortek-renbang	Catatan
Urusan Perdagangan				
1	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	6,0	6,0	Tetap (dibawah target nasional 7,86%)
2	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	46,60	55,00	Naik (mengikuti target nasional 55%)
3	Persentase penanganan pengaduan konsumen	95,00	92,00	Turun (mengikuti target nasional 92%)
4	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	66,00	75,00	Naik (mengikuti target nasional 75%)
5	Tertib Usaha	60,00	90,00	Naik (mengikuti target nasional 90%)
6	Persentase kinerja realisasi pupuk	92,00	90,00	Turun (mengikuti target nasional 90%)
7	Persentase Stabilisasi dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	5,90	5,90	Tetap (sama dengan target nasional 5,9%)
8	Inflasi Pangan Bergejolak	5,00	5,00	Tetap (sama dengan target nasional 5%)
9	Pertumbuhan implementasi PLK (Pasar Lelang Komoditas)	48,00	50,00	Naik (mengikuti target nasional 50%)
Urusan Perindustrian				
1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	0,43	0,43	Tetap (dibawah target nasional 8,4%)
2	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	8,08	8,08	Tetap (dibawah target nasional 18,9%)
3	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	0,93	1,00	Naik (target nasional 181,59 USD Miliar)
4	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (Orang)	264.755	83.683	Turun (target nasional 21,95 juta orang)
5	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	0,727	2,7	Naik (target nasional 613,85 USD Miliar)

2.3.3 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah disajikan berdasarkan beberapa indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB, Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas, Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan dan Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas

a. Permasalahan

Keterbatasan infrastruktur perhubungan yang mendukung lancarnya aktivitas rantai pasok industri dan keterbatasan industri manufaktur berbasis bahan baku komoditas yang dihasilkan dari pengelolaan sumber daya lahan, khususnya perkebunan merupakan permasalahan utama selain belum terwujudnya Kawasan Industri Kemingking.

b. Hambatan

Iklim investasi yang masih berdasarkan *demand base*, belum *supply base* dan ketidakcocokan Rencana Tata Ruang Wilayah dan ketersediaan prasarana pendukung menghambat berkembangnya industri manufaktur dan menghambat terwujudnya Kawasan Industri Kemingking.

2. Persentase penanganan pengaduan konsumen

a. Permasalahan

Belum terjangkaunya masyarakat secara masif dalam perlindungan konsumen, terutama terkait pemahaman masyarakat tentang perlindungan konsumen dan proses penyelesaian sengketa konsumen.

b. Hambatan

Keberpihakan alokasi anggaran dan ketersediaan sumber daya yang belum memadai untuk melakukan sosialisasi perlindungan konsumen secara massif, termasuk proses mediasi.

3. Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

a. Permasalahan

Banyaknya barang yang harus diawasi dan luasnya lingkup pengawasan, terutama untuk barang ber-SNI wajib.

b. Hambatan

Ketersediaan anggaran dan SDM selama ini hanya memungkinkan untuk melakukan pengawasan berdasarkan sampling.

4. Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Disperindag

a. Permasalahan

Keterbatasan ruang lingkup pengujian dan kalibrasi serta tidak adanya kewajiban dari pelaku usaha untuk melakukan pengujian dan kalibrasi di UPTD BPSMB.

b. Hambatan

Keberpihakan alokasi anggaran dan ketersediaan sumber daya yang belum memadai untuk menambah ruang lingkup pengujian dan kalibrasi.

5. Persentase kinerja realisasi pupuk

a. Permasalahan

Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pihak-pihak terkait serta kepatuhan pelaku usaha dalam aspek legalitas dan ketepatan penyaluran pupuk bersubsidi.

b. Hambatan

Ketersediaan anggaran selama ini hanya memungkinkan untuk melakukan pengawasan berdasarkan sampling, mengingat banyaknya pelaku usaha dalam jejang penyaluran pupuk subsidi.

6. Tertib Usaha

a. Permasalahan

Kurang memadainya pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan dan prosedur perizinan.

b. Hambatan

Ketersediaan anggaran selama ini hanya memungkinkan untuk melakukan pengawasan berdasarkan sampling, mengingat banyaknya pelaku usaha yang seharusnya diawasi dan dilayani.

7. Pertumbuhan nilai ekspor non migas

a. Permasalahan

Pada periode 2018 sampai dengan 2022, ekspor asal Provinsi Jambi masih didominasi oleh ekspor komoditi migas dan pertambangan, meskipun pada tahun 2022 ekspor komoditi non migas mulai menempati porsi yang lebih besar dari komoditi migas yaitu sebesar 51,68 persen dari total ekspor. Selain itu, ekspor asal Provinsi Jambi lebih banyak yang melalui pelabuhan di luar Provinsi Jambi yang pada tahun 2022 persentasenya sebesar 57,14%.

b. Hambatan

Belum adanya pelabuhan internasional dan keterbatasan infrastruktur perhubungan yang mendukung lancarnya aktivitas lalu lintas ekspor di Provinsi Jambi.

8. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok

a. Permasalahan

Jumlah ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok yang kurang stabil.

b. Hambatan

Ketersediaan jumlah dan jenis bahan kebutuhan pokok yang belum bisa dipenuhi sepenuhnya dari dalam Provinsi Jambi.

9. Nilai SAKIP

a. Permasalahan

Nilai SAKIP belum sesuai dengan target dengan Predikat BB.

b. Hambatan

kurangnya pemahaman terhadap komponen dan bobot penilaian. Selain itu, dokumen yang kurang lengkap juga menjadi kendala dalam proses penilaian.

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah disajikan berdasarkan beberapa indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB, Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas, Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan dan Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas

a. Tantangan

Meningkatkan Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB, Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas, Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan dan Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas.

b. Peluang

Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB dan Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas sejauh ini telah mencapai target. Sementara Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas, meskipun belum mencapai target tetapi menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan yang masih jauh dari target. Namun hal ini sudah dikomunikasikan, dikoordinasikan dan diusulkan penyesuaian target melalui perubahan RPJMD yang akan disusul dengan Perubahan Renstra dan Renja.

2. Persentase penanganan pengaduan konsumen

a. Tantangan

Mempertahankan capaian kinerja persentase penanganan pengaduan konsumen.

b. Peluang

Dengan dibantu oleh 3 BPSK yang ada, diharapkan kinerja persentase penanganan pengaduan konsumen dapat dipertahankan.

3. Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

a. Tantangan

Meningkatkan kinerja Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan memperbanyak jumlah barang ber SNI Wajib yang diawasi.

b. Peluang

Memperbanyak pengawasan di dalam Kota Jambi yang membutuhkan lebih sedikit anggaran daripada memperbanyak pengawasan di Kabupaten/Kota lain yang membutuhkan anggaran lebih besar.

4. Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Disperindag

a. Tantangan

Mempertahakan/meningkatkan capaian kinerja Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Disperindag.

b. Peluang

Disperindag mempunyai UPTD BPSDM yang fokus terhadap pencapaian kinerja ini. Proses pembelajaran dan perbaikan-perbaikan terus dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja ini.

5. Persentase kinerja realisasi pupuk

a. Tantangan

Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara pihak-pihak terkait serta pengawasan kepatuhan pelaku usaha dalam aspek legalitas dan ketepatan penyaluran/penggunaan pupuk bersubsidi, terutama di level pengecer dan kelompok tani. Karena ada beberapa pemberitaan/informasi tentang penyalahgunaan pupuk bersubsidi.

b. Peluang

Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota karena Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Persentase kinerja realisasi pupuk

juga menjadi Indikator Kunci Keluaran *Outcome* Urusan Perdagangan Kabupaten/Kota.

6. Tertib Usaha

a. Tantangan

Meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan dan prosedur perizinan.

b. Peluang

Provinsi Jambi tidak memiliki Toko Bebas Bea Minuman Beralkohol (TBB MB) dan permohonan penerbitan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor dan Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP B2) Pengecer Terdaftar pun terbilang jarang. Sehingga yang harus ditingkatkan adalah Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi, Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer dan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA), mengingat Provinsi Jambi adalah salah satu Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA.

7. Pertumbuhan nilai ekspor non migas

a. Tantangan

Mempertahankan/meningkatkan pertumbuhan nilai ekspor non migas.

b. Peluang

Pada dasarnya kinerja pertumbuhan nilai ekspor non migas telah mencapai target jika dibandingkan dengan target Renstra Disperindag. Apalagi pada tahun 2022 ekspor komoditi non migas mulai menempati porsi yang lebih besar dari komoditi migas yaitu sebesar 51,68 persen dari total ekspor. Jika hal ini dapat dipertahankan/ditingkatkan, maka kinerja ini

8. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok

a. Tantangan

Menjaga jumlah ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok agar tetap stabil.

b. Peluang

Meskipun jumlah ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok cenderung fluktuatif, namun selama ini Provinsi Jambi masih mampu menjaga stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok.

9. Nilai SAKIP

a. Tantangan

Meningkatkan Nilai SAKIP sesuai dengan target dengan Predikat BB.

b. Peluang

Mempelajari komponen dan bobot penilaian. Selain itu, mendata dan menyiapkan dokumen secara lengkap dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan nilai SAKIP.

2.3.5 Formulasi Isu-Isu Penting dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2024

Formulasi isu-isu penting dalam perumusan Program dan Kegiatan Prioritas 2024 mengacu kepada indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB, Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas, Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan dan Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas

Isu penting pada indikator kinerja ini adalah bagaimana meningkatkan Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB, Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas, Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan dan Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas. Peningkatan ini didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut:

a. PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

- 1) Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi

b. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI

- 1) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi

c. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

- 1) Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

2. Persentase penanganan pengaduan konsumen

Isu penting pada indikator kinerja ini adalah mempertahankan capaian kinerja persentase penanganan pengaduan konsumen. Kinerja ini didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut:

a. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

- 1) Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

3. Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Isu penting pada indikator kinerja ini adalah meningkatkan kinerja Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan memperbanyak jumlah barang ber SNI Wajib yang diawasi. Kinerja ini didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut:

a. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

- 1) Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

4. Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Disperindag

Isu penting pada indikator kinerja ini adalah meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Disperindag. Kinerja ini didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut:

a. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

- 1) Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

5. Persentase kinerja realisasi pupuk

Isu penting pada indikator kinerja ini adalah meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara pihak-pihak terkait serta pengawasan kepatuhan pelaku usaha dalam aspek legalitas dan ketepatan penyaluran/penggunaan pupuk bersubsidi, terutama di level pengecer dan kelompok tani. Kinerja ini didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut:

a. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING

- 1) Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya

6. Tertib Usaha

Isu penting pada indikator kinerja ini adalah meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan dan prosedur perizinan. Kinerja ini didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut:

a. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

- 1) Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor
- 2) Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP B2) Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi
- 3) Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer
- 4) Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)

7. Pertumbuhan nilai ekspor non migas

Isu penting pada indikator kinerja ini adalah mempertahankan/meningkatkan pertumbuhan nilai ekspor non migas. Kinerja ini didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut:

a. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

- 1) Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi

b. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

- 1) Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri
- 2) Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri
- 3) Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

8. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok

Isu penting pada indikator kinerja ini adalah menjaga jumlah ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok agar tetap stabil. Kinerja ini didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut:

a. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING

- 1) Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi
- 2) Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan

9. Nilai SAKIP

Isu penting pada indikator kinerja ini adalah meningkatkan Nilai SAKIP sesuai dengan target dengan Predikat BB.. Kinerja ini didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut:

a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan untuk menyesuaikan rencana kerja. Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan disajikan pada table berikut ini:

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	RANCANGAN AWAL RKPD 2024		HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2024		Catatan Penting
				TARGET 2024	RENCANA PENDANAAN	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			22.582.772.674,00		34.202.375.195,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			22.582.772.674,00		34.202.375.195,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			18.002.772.674,00		27.472.375.195,00	
1	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP		-	BB	18.667.081.347,00	Disesuaikan dengan Kebutuhan
	3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-		473.273.614,00	
	3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-		12.936.770.942,00	
	3.30.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			-		40.000.000,00	
	3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		440.828.350,00	
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-		916.585.042,00	
	3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-		1.975.000.000,00	
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-		566.592.899,00	
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-		1.318.030.500,00	

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	RANCANGAN AWAL RKPD 2024		HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2024		Catatan Penting
				TARGET 2024	RENCANA PENDANAAN	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	<i>Persentase Tertib Usaha</i>	62,00 Persen	888.750.000,00	90,00 Persen	888.750.000,00	Target Kinerja Disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang
	3.30.02.1.01	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor			170.000.000,00		170.000.000,00	
	3.30.02.1.02	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi			360.000.000,00		240.000.000,00	
	3.30.02.1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar			180.000.000,00		300.000.000,00	
	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)			178.750.000,00		178.750.000,00	
3	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	<i>Pertumbuhan implementasi PLK (Pasar Lelang Komoditas)</i>	10,00 Persen	-	10,00 Persen	150.000.000,00	Disesuaikan dengan Kebutuhan
	3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas			-		150.000.000,00	
4	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	<i>1. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok</i> <i>2. Persentase kinerja realisasi pupuk</i>	5,90 Persen 92,00 Persen	1.470.600.000,00	5,90 Persen 90,00 Persen	1.620.600.000,00	Target Persentase Kinerja Realisasi Pupuk disesuaikan dengan hasil Rakortekrenbang
	3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi			255.000.000,00		255.000.000,00	
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			800.000.000,00		800.000.000,00	
	3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya			415.600.000,00		565.600.000,00	

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	RANCANGAN AWAL RKPD 2024		HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2024		Catatan Penting
				TARGET 2024	RENCANA PENDANAAN	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5 ,	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	<i>Pertumbuhan nilai ekspor non migas</i>	6,00 Persen	1.747.950.000,00	6,00 Persen	1.747.950.000,00	-
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi			1.747.950.000,00		1.747.950.000,00	
6 ,	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	<i>1. Nilai IKM Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang</i> <i>2. Persentase komoditi potensial yang diuji sesuai dengan ketentuan berlaku</i> <i>3. Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen</i> <i>4. Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</i>	80,00 (B) Indeks 67,00 Persen 100,00 Persen 46,60 Persen	13.139.077.090,00	79,00 (B) Indeks 75,00 Persen 92,00 Persen 55,00 Persen	3.396.727.885,00	Target Kinerja Disesuaikan dengan Renstra dan Hasil Rakortekrenbang
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota			1.186.108.912,00		1.186.108.912,00	
	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota			11.952.968.178,00		1.814.946.098,00	
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota			-		395.672.875,00	
7 ,	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	<i>Persentase Pasar Modern yang memasarkan produk dalam negeri</i>	60,00 Persen	756.395.584,00	55,00 Persen	1.001.265.963,00	Target Kinerja Disesuaikan dengan Renstra
	3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri			756.395.584,00		756.395.584,00	
	3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri			-		37.196.014,00	
	3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			-		207.674.365,00	

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	RANCANGAN AWAL RKPD 2024		HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2024		Catatan Penting
				TARGET 2024	RENCANA PENDANAAN	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			4.580.000.000,00		6.730.000.000,00	
1	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	<p>1. Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas</p> <p>2. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas</p> <p>3. Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB</p> <p>4. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP</p> <p>5. Persentase pertambahan jumlah industri besar di Provinsi</p> <p>6. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas</p> <p>7. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan</p>	<p>1,55 USD Miliar</p> <p>0,827 Triliun Rupiah</p> <p>9.9 Persen</p> <p>83,00 Persen</p> <p>1 Persen</p> <p>3,70 Persen</p> <p>107.000 Orang</p>	3.800.000.000,00	<p>1,00 USD Miliar</p> <p>2,700 Triliun Rupiah</p> <p>8.08 Persen</p> <p>65,50 Persen</p> <p>1 Persen</p> <p>0,43 Persen</p> <p>83,683 Orang</p>	5.300.000.000,00	Target Kinerja Disesuaikan dengan Renstra dan Hasil Rakortekrenbang
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi			3.800.000.000,00		5.300.000.000,00	
2	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin sesuai Kewenangan yang dikendalikan	20,00 Persen	300.000.000,00	20,00 Persen	950.000.000,00	Disesuaikan dengan Kebutuhan
	3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi			300.000.000,00		950.000.000,00	
3	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	5,00 Persen	480.000.000,00	15,00 Persen	480.000.000,00	Target Kinerja Disesuaikan dengan Renstra
	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			480.000.000,00		480.000.000,00	
JUMLAH					22.582.772.674,00		34.202.375.195,00	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program dan kegiatan masyarakat diperoleh dari Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forum Lintas OPD dan Musyawarah Rencana Pembangunan. Untuk urusan perdagangan dan perindustrian, usulan ini terutama ditampung melalui Forum OPD yang melibatkan perwakilan tiap-tiap Kabupaten/kota yang menangani urusan perdagangan dan perindustrian. Usulan-usulan ini kemudian disesuaikan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan-usulan dimaksud seperti:

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan)	Kerinci	Periode pengendalian harga dan informasi ketersediaan stok Bapok dan Bapokting	1 Kali Operasi Pasar	
2	Program Pengembangan Ekspor (Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi)	Kerinci	Jumlah Produk Ekspor Unggulan Provinsi Jambi	1 Pembinaan/ Pelatihan Usaha Ekspor	
3	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen (Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota)	Tebo	Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	1 Kegiatan Pengawasan	

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri (Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi)	<ul style="list-style-type: none"> - Kerinci - Sarolangun - Muaro Jambi - Tanjung Jabung Barat - Bungo - Tanjung Jabung Timur 	<p>Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 8 Pelatihan IKM - 20 Sertifikat Halal - 4 Paket Bantuan Alat IKM 	
5	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas))	<ul style="list-style-type: none"> - Muaro Jambi - Tanjung Jabung Timur 	<p>Jumlah Data dan Informasi Industri Berbasis SIINas Periode penyampaian informasi Industri Kewenangan Provinsi</p>	<p>1 Bimtek SIINas</p>	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Tema Pembangunan Nasional yang direncanakan akan ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah ***“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”***. Adapun arah kebijakan RKP Tahun 2024 ada 8 dengan rincian:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
4. Penguatan daya saing usaha;
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Sedangkan prioritas pembangunan diarahkan untuk:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta
7. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

3.1.1 Kementerian Perdagangan

Arah kebijakan Kementerian Perdagangan tahun 2024 ditujukan untuk memperkuat agenda pembangunan dan RPJMN 2020-2024. Kementerian perdagangan berupaya mendukung Prioritas Nasional (PN) yaitu pada:

1. PN 01, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. PN 03, meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing; dan
3. PN 04, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

3.1.2 Kementerian Perindustrian

Arah kebijakan Kementerian Perindustrian pada Tahun 2024 difokuskan pada upaya untuk mengatasi isu utama pembangunan industri melalui:

1. Peningkatan produktivitas melalui perbaikan rantai pasok dan reskilling dan upskilling tenaga kerja;
2. Peningkatan lokalisasi produk dan bahan baku impor;
3. Akselerasi hilirisasi komoditas mineral dan batu bara melalui pembangunan smelter dan infrastruktur pendukung;
4. Peningkatan kualitas dan inovasi produk yang didukung komersialisasi hasil riset dan penguatan infrastruktur kualitas;
5. Penguatan ekosistem pemampu industri bernilai tambah dan berteknologi tinggi, serta industri hijau termasuk untuk produksi dan adopsi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai;
6. Fasilitasi restrukturisasi mesin industri;
7. Optimalisasi sumber pertumbuhan industri, termasuk pengembangan produk dan industri halal sesuai Master Plan Industri Halal;
8. Percepatan pembangunan dan operationlisasi kawasan industri/smelter prioritas; serta
9. Percepatan penerapaaan industri 4.0 di subsector prioritas.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pemerintah Provinsi Jambi sebagai

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di pada satu tahun mendatang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi.

A. TUJUAN

Adapun tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab isu strategis bidang perindustrian dan perdagangan Provinsi Jambi dan permasalahan-permasalahan bidang perindustrian dan perdagangan Provinsi Jambi. Berdasarkan isu-isu strategis dan permasalahan-permasalahan bidang perindustrian dan perdagangan Provinsi Jambi maka ditetapkan tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya saing industri guna mendukung perekonomian daerah;
2. Meningkatkan peran sektor perdagangan untuk mendukung perekonomian daerah;
3. Meningkatkan perdagangan luar negeri;
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat dan dunia usaha
5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas

B. SASARAN

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan diatas, maka perlu dirumuskan sasaran-sasaran yang sifatnya kuantitatif sehingga mudah untuk diukur keberhasilan pencapaiannya. Adapun sasaran pembangunan sektor industri dan perdagangan yang ingin diwujudkan sebagaimana yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan. Untuk mewujudkan tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan, maka disusunlah sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan tujuan meningkatkan daya saing industri guna mendukung perekonomian daerah, ditetapkan sasaran berupa tumbuh dan berkembangnya sektor industri dengan indikator sasaran adalah :

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

- a. Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB (%)
 - b. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas (%)
 - c. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan (orang)
2. Untuk mewujudkan tujuan meningkatkan peran sektor perdagangan untuk mendukung perekonomian daerah, ditetapkan sasaran berupa tumbuh dan berkembangnya perdagangan dalam negeri dengan indikator sasaran adalah :
 - a. Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%)
 - b. Persentase barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (%)
 - c. Persentase Komoditi Potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (%)
 - d. Persentase kinerja realisasi pupuk (%)
 - e. Tertib Usaha (%)
3. Untuk mewujudkan tujuan meningkatkan perdagangan luar negeri, ditetapkan sasaran berupa meningkatnya nilai ekspor dengan indikator sasaran adalah :
 - a. Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Non Migas (USD Miliar)
 - b. Pertumbuhan nilai ekspor non migas (%)
4. Untuk mewujudkan tujuan meningkatkan pelayanan masyarakat dan dunia usaha, ditetapkan sasaran berupa meningkatnya kualitas kinerja pelayanan eksternal dan internal dengan indikator sasaran adalah :
 - a. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
5. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas, ditetapkan sasaran berupa terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator sasaran adalah :
 - a. Nilai SAKIP

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi melalui program/kegiatannya pada tahun 2024 adalah sebagai berikut ini.

Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatkan daya saing industri guna mendukung perekonomian daerah	Tumbuh dan berkembangnya sektor industri	1 Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB (%)	8.08
			2 Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas (%)	0.43
			3 Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan (orang)	83.683
2	Meningkatkan peran sektor perdagangan untuk mendukung perekonomian daerah	Tumbuh dan berkembangnya perdagangan dalam negeri	1 Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%)	92,00
			2 Persentase barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (%)	55,00
			3 Persentase Komoditi Potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (%)	75,00
			4 Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	90,00
			5 Tertib Usaha (%)	90,00
3	Meningkatkan perdagangan luar negeri	Meningkatnya nilai ekspor	1 Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Non Migas (USD Miliar)	1,000
			2 Pertumbuhan nilai ekspor non migas (%)	6,0
4	Meningkatkan pelayanan masyarakat dan dunia usaha	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan eksternal dan internal organisasi	1 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi	79,00
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1 Nilai SAKIP	BB

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI

3.3.1 Faktor yang Menjadi Bahan Petimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan kerangka pembangunan strategis Provinsi Jambi untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi dan program gubernur, RPJMD berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan baik RPJP maupun RPJM Nasional. RPJMD Provinsi Jambi disahkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi 2021 – 2026.

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Gubernur sebagai Kepala Daerah, RPJMD menjadi pijakan bagi perencanaan strategis baik SKPD Provinsi maupun Kabupaten Kota, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi Gubernur Jambi yang tertuang dalam RPJMD tersebut. Adapun Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2021 – 2026 yaitu :

“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Jambi dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan Memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka maksud dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

Jambi Maju : Suatu kondisi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman.

Jambi Aman : tercipta dan terpeliharanya keamanan dalam masyarakat Provinsi Jambi, baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam,

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan menurun, meningkatnya penegakan supremasi hukum, meningkatnya adaptasi terhadap resiko terjadinya bencana alam, serta terwujudnya ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Jambi Nyaman: Sikap dan kondisi masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri, sehingga berada pada tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. Diukur dari kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif antara pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.

Jambi Tertib : Terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat.

Jambi Amanah: Membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dengan mengedepankan kultur masyarakat Jambi yang religius dan mengayomi seluruh masyarakat yang plural.

Jambi Profesional: Suatu kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang kompetitif dan karakter penuh tanggung jawab.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 3 (tiga) misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026, sebagai berikut

Misi satu : Memantapkan Tatakelola Pemerintahan, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung e-government yang terintegrasi.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

- Misi dua** : **Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah**, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.
- Misi tiga** : **Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia**, yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sehingga berdaya saing melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, keagamaan, sosial budaya dan kesetaraan gender.

3.3.2 Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, menempatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terutama untuk mendukung Misi 2 (dua) yaitu ***“Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah”***

Dalam upaya mewujudkan Misi ke-2 (dua) tersebut, dengan Pagu Indikatif sebesar Rp 19.854.938.429,00 maka ada 8 program dan 15 Kegiatan urusan pilihan perindustrian dan perdagangan yang akan dilakukan tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Urusan Pilihan Perdagangan**, melalui program dan Kegiatan:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
 - 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
 - 1) Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan; dan

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

- 2) Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya.
- c. Program Pengembangan Ekspor;
 - 1) Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi.
- d. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
 - 1) Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2) Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
 - 3) Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
- e. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
 - 1) Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri
- 2. Urusan Pilihan Perindustrian, melalui program dan Kegiatan:**
 - a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
 - 1) Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
 - b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri;
 - 1) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi
 - c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;
 - 1) Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

3.3.3 Perbandingan Rumusan Program dan Kegiatan dengan Rancangan Awal

Terdapat perbedaan yang signifikan antara Rencana Pendanaan pada Rancangan Awal Renja yang berjumlah Rp22.582.772.674,00 dengan dengan Pagu Indikatif pada Rancangan Akhir Renja yang berjumlah Rp34.202.375.195,00. Rincian perbedaannya dapat dilihat pada table berikut:

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	RANCANGAN AWAL RENJA 2024		RANCANGAN AKHIR RENJA 2024		Selisih Rencana Pendanaan dengan Pagu Indikatif (Rp)
				TARGET 2024	RENCANA PENDANAAN	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 6
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			22.582.772.674,00		34.202.375.195,00	11.619.602.521,00
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			22.582.772.674,00		34.202.375.195,00	11.619.602.521,00
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			18.002.772.674,00		27.472.375.195,00	9.469.602.521,00
1,	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai SAKIP</i>		-	BB	18.667.081.347,00	18.667.081.347,00
	3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-		473.273.614,00	473.273.614,00
	3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-		12.936.770.942,00	12.936.770.942,00
	3.30.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			-		40.000.000,00	40.000.000,00
	3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		440.828.350,00	440.828.350,00
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-		916.585.042,00	916.585.042,00
	3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-		1.975.000.000,00	1.975.000.000,00
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-		566.592.899,00	566.592.899,00
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-		1.318.030.500,00	1.318.030.500,00

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	RANCANGAN AWAL RENJA 2024		RANCANGAN AKHIR RENJA 2024		Selisih Rencana Pendanaan dengan Pagu Indikatif (Rp)
				TARGET 2024	RENCANA PENDANAAN	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 6
2,	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	<i>Persentase Tertib Usaha</i>	62,00 Persen	888.750.000,00	90,00 Persen	888.750.000,00	-
	3.30.02.1.01	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor			170.000.000,00		170.000.000,00	-
	3.30.02.1.02	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi			360.000.000,00		240.000.000,00	(120.000.000,00)
	3.30.02.1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar			180.000.000,00		300.000.000,00	120.000.000,00
	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)			178.750.000,00		178.750.000,00	-

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	RANCANGAN AWAL RENJA 2024		RANCANGAN AKHIR RENJA 2024		Selisih Rencana Pendanaan dengan Pagu Indikatif (Rp)
				TARGET 2024	RENCANA PENDANAAN	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 6
3,	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	<i>Pertumbuhan implementasi PLK (Pasar Lelang Komoditas)</i>	10,00 Persen	-	10,00 Persen	150.000.000,00	150.000.000,00
	3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas			-		150.000.000,00	150.000.000,00
4,	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	<i>1. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok</i> <i>2. Persentase kinerja realisasi pupuk</i>	5,90 Persen 92,00 Persen	1.470.600.000,00	5,90 Persen 90,00 Persen	1.620.600.000,00	150.000.000,00
	3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi			255.000.000,00		255.000.000,00	-
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			800.000.000,00		800.000.000,00	-

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	RANCANGAN AWAL RENJA 2024		RANCANGAN AKHIR RENJA 2024		Selisih Rencana Pendanaan dengan Pagu Indikatif (Rp)
				TARGET 2024	RENCANA PENDANAAN	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 6
	3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya			415.600.000,00		565.600.000,00	150.000.000,00
5,	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	<i>Pertumbuhan nilai ekspor non migas</i>	6,00 Persen	1.747.950.000,00	6,00 Persen	1.747.950.000,00	-
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi			1.747.950.000,00		1.747.950.000,00	-
6,	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	<p>1. Nilai IKM Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang</p> <p>2. Persentase komoditi potensial yang diuji sesuai dengan ketentuan berlaku</p> <p>3. Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen</p> <p>4. Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</p>	<p>80,00 (B) Indeks</p> <p>67,00 Persen</p> <p>100,00 Persen</p> <p>46,60 Persen</p>	13.139.077.090,00	<p>79,00 (B) Indeks</p> <p>75,00 Persen</p> <p>92,00 Persen</p> <p>55,00 Persen</p>	3.396.727.885,00	(9.742.349.205,00)

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	RANCANGAN AWAL RENJA 2024		RANCANGAN AKHIR RENJA 2024		Selisih Rencana Pendanaan dengan Pagu Indikatif (Rp)
				TARGET 2024	RENCANA PENDANAAN	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 6
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota			1.186.108.912,00		1.186.108.912,00	-
	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota			11.952.968.178,00		1.814.946.098,00	(10.138.022.080,00)
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota			-		395.672.875,00	395.672.875,00
7,	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	<i>Persentase Pasar Modern yang memasarkan produk dalam negeri</i>	60,00 Persen	756.395.584,00	55,00 Persen	1.001.265.963,00	244.870.379,00
	3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri			756.395.584,00		756.395.584,00	-
	3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri			-		37.196.014,00	37.196.014,00
	3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			-		207.674.365,00	207.674.365,00

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	RANCANGAN AWAL RENJA 2024		RANCANGAN AKHIR RENJA 2024		Selisih Rencana Pendanaan dengan Pagu Indikatif (Rp)
				TARGET 2024	RENCANA PENDANAAN	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 6
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			4.580.000.000,00		6.730.000.000,00	2.150.000.000,00
1,	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	<p>1. Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas</p> <p>2. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas</p> <p>3. Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB</p> <p>4. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP</p> <p>5. Persentase pertambahan jumlah industri besar di Provinsi</p> <p>6. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas</p> <p>7. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan</p>	<p>1,55 USD Miliar</p> <p>0,827 Triliun Rupiah</p> <p>9.9 Persen</p> <p>83,00 Persen</p> <p>1 Persen</p> <p>3,70 Persen</p> <p>107.000 Orang</p>	<p>3.800.000.000,00</p>	<p>1,00 USD Miliar</p> <p>2,700 Triliun Rupiah</p> <p>8.08 Persen</p> <p>65,50 Persen</p> <p>1 Persen</p> <p>0,43 Persen</p> <p>83,683 Orang</p>	<p>5.300.000.000,00</p>	1.500.000.000,00

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	RANCANGAN AWAL RENJA 2024		RANCANGAN AKHIR RENJA 2024		Selisih Rencana Pendanaan dengan Pagu Indikatif (Rp)
				TARGET 2024	RENCANA PENDANAAN	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 6
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi			3.800.000.000,00		5.300.000.000,00	1.500.000.000,00
2,	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	<i>Persentase Izin sesuai Kewenangan yang dikendalikan</i>	20,00 Persen	300.000.000,00	20,00 Persen	950.000.000,00	650.000.000,00
	3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi			300.000.000,00		950.000.000,00	650.000.000,00
3,	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	<i>Persentase ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini</i>	5,00 Persen	480.000.000,00	15,00 Persen	480.000.000,00	-
	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			480.000.000,00		480.000.000,00	-
JUMLAH					22.582.772.674,00		34.202.375.195,00	11.619.602.521,00

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

3.3.4 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			34.202.375.195,00		41.000.850.638,80
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			34.202.375.195,00		41.000.850.638,80
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			27.472.375.195,00		33.261.850.638,80
1,	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai SAKIP</i>	BB	18.667.081.347,00	BB	20.325.339.620,80
	3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			473.273.614,00		544.264.655,00
	3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12.936.770.942,00		13.606.132.239,00
	3.30.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			40.000.000,00		46.000.000,00
	3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			440.828.350,00		506.952.602,50
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			916.585.042,00		1.054.072.797,45
	3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.975.000.000,00		2.271.250.000,00
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			566.592.899,00		651.581.833,85
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.318.030.500,00		1.645.085.493,00

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
2,	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	<i>Persentase Tertib Usaha</i>	90,00 Persen	888.750.000,00	90,00 Persen	1.119.500.000,00
	3.30.02.1.01	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor			170.000.000,00		195.500.000,00
	3.30.02.1.02	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi			240.000.000,00		268.000.000,00
	3.30.02.1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar			300.000.000,00		345.000.000,00
	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)			178.750.000,00		311.000.000,00

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
3,	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	<i>Pertumbuhan implementasi PLK (Pasar Lelang Komoditas)</i>	10,00 Persen	150.000.000,00	10,00 Persen	172.500.000,00
	3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas			150.000.000,00		172.500.000,00
4,	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	<i>1. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok</i> <i>2. Persentase kinerja realisasi pupuk</i>	5,90 Persen 92,00 Persen	1.620.600.000,00	5,90 Persen 92,00 Persen	4.863.690.000,00
	3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi			255.000.000,00		293.250.000,00
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			800.000.000,00		3.920.000.000,00

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya			565.600.000,00		650.440.000,00
5,	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	<i>Pertumbuhan nilai ekspor non migas</i>	6,00 Persen	1.747.950.000,00	6,00 Persen	1.723.160.000,00
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi			1.747.950.000,00		1.723.160.000,00
6,	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	<i>1. Nilai IKM Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang</i> <i>2. Persentase komoditi potensial yang diuji sesuai dengan ketentuan berlaku</i> <i>3. Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen</i> <i>4. Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</i>	79,00 (B) Indeks 75,00 Persen 92,00 Persen 90,00 Persen	3.396.727.885,00	79,00 (B) Indeks 75,00 Persen 92,00 Persen 90,00 Persen	3.906.205.161,00

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota			1.186.108.912,00		1.363.993.344,00
	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota			1.814.946.098,00		2.087.188.011,00
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota			395.672.875,00		455.023.806,00
7,	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	<i>Persentase Pasar Modern yang memasarkan produk dalam negeri</i>	55,00 Persen	1.001.265.963,00	55,00 Persen	1.151.455.857,00
	3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri			756.395.584,00		869.854.922,00
	3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri			37.196.014,00		42.775.416,00
	3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			207.674.365,00		238.825.519,00

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			6.730.000.000,00		7.739.000.000,00
1,	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	<p>1. Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas</p> <p>2. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas</p> <p>3. Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB</p> <p>4. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP</p> <p>5. Persentase pertambahan jumlah industri besar di Provinsi</p> <p>6. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas</p> <p>7. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan</p>	<p>1,00 USD Miliar</p> <p>0,727 Triliun Rupiah</p> <p>8.08 Persen</p> <p>65,50 Persen</p> <p>1 Persen</p> <p>0,43 Persen</p> <p>83,683 Orang</p>	<p>5.300.000.000,00</p>	<p>1,00 USD Miliar</p> <p>0,727 Triliun Rupiah</p> <p>8.08 Persen</p> <p>65,50 Persen</p> <p>1 Persen</p> <p>0,43 Persen</p> <p>83,683 Orang</p>	<p>6.094.500.000,00</p>

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi			5.300.000.000,00		6.094.500.000,00
2,	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	<i>Persentase Izin sesuai Kewenangan yang dikendalikan</i>	20,00 Persen	950.000.000,00	20,00 Persen	1.092.500.000,00
	3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi			950.000.000,00		1.092.500.000,00
3,	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	<i>Persentase ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini</i>	15,00 Persen	480.000.000,00	15,00 Persen	552.000.000,00
	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			480.000.000,00		552.000.000,00
JUMLAH					34.202.375.195,00		41.000.850.638,80

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISPERINDAG PROVINSI JAMBI

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 202 adalah sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1 Rencana Program Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2023

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			34.202.375.195,00		41.000.850.638,80
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			34.202.375.195,00		41.000.850.638,80
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			27.472.375.195,00		33.261.850.638,80
1,	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai SAKIP</i>	BB	18.667.081.347,00	-	20.325.339.620,80
	3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	473.273.614,00	-	544.264.655,00
	3.30.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	6 Dokumen	330.894.100,00		380.528.215,00
	3.30.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD					
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	6 Dokumen	38.500.000,00		44.275.000,00
	3.30.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	6 Laporan	34.358.736,00		39.512.546,00
	3.30.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	4 Laporan	69.520.778,00		79.948.894,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	12.936.770.942,00	-	13.606.132.239,00
	3.30.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	14 Orang/Bulan	12.711.543.442,00		13.347.120.614,00
	3.30.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	12 Dokumen	179.227.500,00		206.111.625,00
	3.30.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	2 Laporan	46.000.000,00		52.900.000,00
	3.30.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	40.000.000,00	-	46.000.000,00
	3.30.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	3 Laporan	40.000.000,00		46.000.000,00
	3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	440.828.350,00	-	506.952.602,50
	3.30.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>	1 Paket	130.812.500,00		150.434.375,00
	3.30.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	5 Dokumen	43.642.500,00		50.188.875,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	3.30.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	30 Orang	266.373.350,00		306.329.352,50
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	916.585.042,00	-	1.054.072.797,45
	3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	45.004.388,00		51.755.046,20
	3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	132.859.660,00		152.788.609,00
	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	47.587.575,00		54.725.711,25
	3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	1 Dokumen	8.077.462,00		9.289.081,00
	3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	483.055.957,00		555.514.350,00
	3.30.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	12 Dokumen	200.000.000,00		230.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.975.000.000,00	-	2.271.250.000,00
	3.30.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>	30 Unit	450.000.000,00		517.500.000,00
	3.30.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	1 Unit	550.000.000,00		632.500.000,00
	3.30.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel					
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	1 Paket	5.000.000,00		5.750.000,00
	3.30.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	5 Unit	55.000.000,00		63.250.000,00
	3.30.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	1 Unit	800.000.000,00		920.000.000,00
	3.30.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	1 Unit	115.000.000,00		132.250.000,00
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	566.592.899,00	-	651.581.833,85
	3.30.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1 Laporan	84.640.000,00		97.336.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	335.066.849,00		385.326.876,35
	3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	146.886.050,00		168.918.957,50
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.318.030.500,00	-	1.645.085.493,00
	3.30.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	30 Unit	400.223.000,00		460.256.450,00
	3.30.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	5 Unit	75.000.000,00		86.250.000,00
	3.30.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel					
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>	5 Unit	25.000.000,00		28.750.000,00
	3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	20 Unit	97.807.500,00		112.478.625,00
	3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	5 Unit	470.000.000,00		669.850.418,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	3.30.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	2 Unit	250.000.000,00		287.500.000,00
2,	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Tertib Usaha	90,00 Persen	888.750.000,00	-	1.119.500.000,00
	3.30.02.1.01	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	<i>Jumlah SIUP MB Toko Bebas Bea/Distributor yang diterbitkan</i>	4 Dokumen	170.000.000,00	-	195.500.000,00
	3.30.02.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					
			<i>Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	4 Dokumen	170.000.000,00		195.500.000,00
	3.30.02.1.02	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	<i>Jumlah Rekomendasi SIUP B2 yang diterbitkan</i>	15 Rekomendasi	240.000.000,00	-	268.000.000,00
	3.30.02.1.02.0001	Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik					
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	5 Dokumen	120.000.000,00		130.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	3.30.02.1.02.0003	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik					
			<i>Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission</i>	6 Dokumen	120.000.000,00		138.000.000,00
	3.30.02.1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	<i>Jumlah pengendalian usaha perdagangan</i>	4 pelaku usaha	300.000.000,00	-	345.000.000,00
	3.30.02.1.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik					
			<i>Jumlah Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission</i>	4 Dokumen	120.000.000,00		138.000.000,00
	3.30.02.1.03.0002	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya					
			<i>Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission</i>	4 Dokumen	100.000.000,00		115.000.000,00
	3.30.02.1.03.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya					
			<i>Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya</i>	1 Laporan	80.000.000,00		92.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	<i>Jumlah dokumen SKA/API yang diterbitkan tepat waktu</i>	120 Dokumen	178.750.000,00	-	311.000.000,00
	3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA					
			<i>Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal</i>	15 Dokumen	178.750.000,00		311.000.000,00
3,	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	<i>Pertumbuhan implementasi PLK (Pasar Lelang Komoditas)</i>	10,00 Persen	150.000.000,00	-	172.500.000,00
	3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	-	-	150.000.000,00	-	172.500.000,00
	3.30.03.1.01.0003	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas					
			<i>Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi</i>	30 Orang	150.000.000,00		172.500.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
4,	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	1. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok 2. Persentase kinerja realisasi pupuk	5,90 Persen 92,00 Persen	1.620.600.000,00	-	4.863.690.000,00
	3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Periode pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	12 bulan	255.000.000,00	-	293.250.000,00
	3.30.04.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor					
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	1 Laporan	170.000.000,00		195.500.000,00
	3.30.04.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor					
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	1 laporan	85.000.000,00		97.750.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	<i>Periode pengendalian harga dan informasi ketersediaan stok Bapok dan Bapokting</i>	12 BULAN	800.000.000,00	-	3.920.000.000,00
	3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	1 Laporan	800.000.000,00		3.920.000.000,00
	3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	<i>Jumlah Kabupaten Kota yang dilakukan pengawasan Pupuk Bersubsidi</i>	11 kab/kota	565.600.000,00	-	650.440.000,00
	3.30.04.1.03.0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi					
			<i>Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi</i>	4 Laporan	150.000.000,00		172.500.000,00
	3.30.04.1.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi					
			<i>Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%</i>	1 Laporan	150.000.000,00		172.500.000,00
	3.30.04.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida					
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida</i>	1 Laporan	175.600.000,00		201.940.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	3.30.04.1.03.0005	Pemeriksaan dokumen persyaratan perizinan distributor pupuk bersubsidi					
			<i>Jumlah laporan pemeriksaan persyaratan perizinan distributor pupuk bersubsidi</i>	5 Laporan	90.000.000,00		103.500.000,00
5,	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	<i>Pertumbuhan nilai ekspor non migas</i>	6,00 Persen	1.747.950.000,00	-	1.723.160.000,00
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	<i>Jumlah Produk Ekspor Unggulan Provinsi Jambi</i>	6 Produk	1.747.950.000,00	-	1.723.160.000,00
	3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional					
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang</i>	2 Pelaku Usaha	300.000.000,00		345.000.000,00
	3.30.05.1.01.0002	Pameran Dagang Lokal					
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal</i>	100 Pelaku Usaha	250.000.000,00		287.500.000,00
	3.30.05.1.01.0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan					
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan</i>	2 Pelaku Usaha	700.000.000,00		805.000.000,00
	3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor					
			<i>Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi</i>	6 Produk	497.950.000,00		285.660.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
6,	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1. Nilai IKM Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang 2. Persentase komoditi potensial yang diuji sesuai dengan ketentuan berlaku 3. Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen 4. Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	79,00 (B) Indeks 75,00 Persen 92,00 Persen 90,00 Persen	3.396.727.885,00	-	3.906.205.161,00
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Konsumen	11 Kab/Kota	1.186.108.912,00	-	1.363.993.344,00
	3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen					
			Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	3 BPSK	402.362.831,00		462.717.256,00
	3.30.06.1.01.0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen					
			Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	2 LPKSM	183.148.375,00		210.588.726,00
	3.30.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen					
			Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	5 Pengaduan	600.597.706,00		690.687.362,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah pengujian mutu produk</i>	2773 Parameter	1.814.946.098,00	-	2.087.188.011,00
	3.30.06.1.02.0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi					
			<i>Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan</i>	900 Sertifikat	527.979.444,00		607.176.360,00
	3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian					
			<i>Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan</i>	10 laporan	912.068.965,00		1.048.879.309,00
	3.30.06.1.02.0006	Pemantauan Mutu Produk					
			<i>Jumlah produk potensial yang dipantau</i>	50 Produk	156.397.689,00		179.857.342,00
	3.30.06.1.02.0007	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi					
			<i>Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan</i>	11 Sertifikat	218.500.000,00		251.275.000,00
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	-	-	395.672.875,00	-	455.023.806,00
	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga					
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi</i>	1 Laporan	395.672.875,00		455.023.806,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
7,	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pasar Modern yang memasarkan produk dalam negeri	55,00 Persen	1.001.265.963,00	-	1.151.455.857,00
	3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah Promosi penggunaan Produk dalam Negeri	5 kali	756.395.584,00	-	869.854.922,00
	3.30.07.1.01.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi					
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	6 UMKM	756.395.584,00		869.854.922,00
	3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	37.196.014,00	-	42.775.416,00
	3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi					
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	11 UMKM	37.196.014,00		42.775.416,00
	3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	207.674.365,00	-	238.825.519,00
	3.30.07.1.03.0002	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri					
			Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1 Laporan	85.000.000,00		97.750.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	3.30.07.1.03.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri					
			<i>Jumlah orang yang mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri</i>	2 Orang	72.674.365,00		83.575.519,00
	3.30.07.1.03.0005	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi					
			<i>Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer</i>	1 Laporan	50.000.000,00		57.500.000,00
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			6.730.000.000,00		7.739.000.000,00
1,	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1. Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas 2. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas 3. Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB 4. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP 5. Persentase pertambahan jumlah industri besar di Provinsi 6. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas 7. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan	1,00 USD Miliar 0,727 Triliun Rupiah 8,08 Persen 65,50 Persen 1 Persen 0,43 Persen 83,683 Orang	5.300.000.000,00	-	6.094.500.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	<i>Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP Persentase pertambahan jumlah industri besar di Provinsi</i>	83 %1 %	5.300.000.000,00	-	6.094.500.000,00
	3.31.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi					
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri</i>	1 Dokumen	350.000.000,00		402.500.000,00
	3.31.02.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri					
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri</i>	1 Dokumen	200.000.000,00		230.000.000,00
	3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri					
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri</i>	1 Dokumen	950.000.000,00		1.092.000.000,00
	3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri					
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri</i>	1 Dokumen	500.000.000,00		575.000.000,00
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat					
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</i>	1 Dokumen	3.200.000.000,00		3.680.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	3.31.02.1.01.0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri					
			<i>Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri</i>	1 Dokumen	100.000.000,00		115.000.000,00
2,	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin sesuai Kewenangan yang dikendalikan	20,00 Persen	950.000.000,00	-	1.092.500.000,00
	3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	<i>Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait</i>	100 % 100 % 100 %	950.000.000,00	-	1.092.500.000,00
	3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi					
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi</i>	1 Dokumen	300.000.000,00		345.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	3.31.03.1.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)					
			<p><i>Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi:</i></p> <p>1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.</p>	12 Dokumen	650.000.000,00		747.500.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
3,	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	<i>Persentase ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini</i>	15,00 Persen	480.000.000,00	-	552.000.000,00
	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	<i>Jumlah Data dan Informasi Industri Berbasis SIINas Periode penyampaian informasi Industri Kewenangan Provinsi</i>	1115 unit 12 Bulan	480.000.000,00	-	552.000.000,00
	3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)					
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</i>	1 Dokumen	480.000.000,00		552.000.000,00
	J U M L A H				34.202.375.195,00		41.000.850.638,80

BAB V

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang at Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pambangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2024, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD dan Rencana Strategis (RENSTRA).

Selain target RPJMD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU), yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

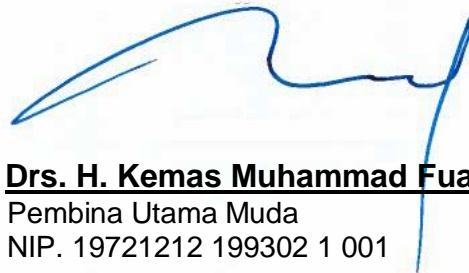
1. Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB (%)
2. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas (%)
3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan (orang)
4. Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%)
5. Persentase barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (%)
6. Persentase Komoditi Potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (%)
7. Persentase kinerja realisasi pupuk (%)
8. Tertib Usaha (%)
9. Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Non Migas (USD Miliar)
10. Pertumbuhan nilai ekspor non migas (%)

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

11. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
12. Nilai SAKIP

Dalam mewujudkan kinerja tersebut diperlukan dukungan dalam hal ketersediaan anggaran kegiatan. Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi ini merupakan masukan utama dalam menyusun RKA, KUA PPAS dan RAPBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024. Jika kebutuhan pendanaan dapat dipenuhi, semoga Rencana Kerja ini dapat direalisasikan oleh seluruh jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

Jambi, 2023
KEPALA DINAS



Drs. H. Kemas Muhammad Fuad, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19721212 199302 1 001